

ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN DANA BAGI HASIL (DBH PAJAK & SUMBER DAYA ALAM) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Rasyid Syaikra Abdi Guna^a, Nuhbatul Basyariah^b, Nunung Nurlaela ^{*c}

^a STEI Hamfara Yogyakarta | rasyidfile@gmail.com,

^b STEI Hamfara Yogyakarta | nbasyariah2@gmail.com

^{*c} STEI Hamfara Yogyakarta | penulis korespondensi: nunungnurlaela@steihamfara.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DBH (Dana Bagi Hasil) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan juga Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2010-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengujian regresi linier sederhana. Sampel yang digunakan adalah data time series tahunan 13 tahun dari tahun 2010-2022 terhadap variabel DBH, PDRB dan Tingkat Kemiskinan. Data yang diambil merupakan data sekunder dari website resmi BPS dan DJPK Kemenkeu RI. Teknik pengolahan data menggunakan uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, dan hipotesis uji signifikansi. Pengujian dilakukan menggunakan Microsoft Excel dan IBM Statistik SPSS versi 20. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DBH berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dimana $t\text{-hitung } 2,623 > t\text{-tabel } 2,20099$, dan juga DBH berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemiskinan dimana $t\text{-hitung } 3,685 > t\text{-tabel } 2,20099$.

Kata kunci: DBH (Dana Bagi Hasil), Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Tingkat Kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of DBH (Production Sharing Fund) on Economic Growth and also the Poverty Level in Meranti Islands Regency in 2010-2022. This research uses quantitative methods with simple linear regression testing. The sample used is 13 year annual time series data from 2010-2022 on the DBH, Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Poverty Level variables. The data taken is secondary data from the official BPS and DJPK websites of the Indonesian Ministry of Finance. Data processing techniques use correlation coefficient tests, coefficient of determination tests, and hypothesis significance tests. Tests were carried out using Microsoft Excel and IBM SPSS Statistics version 20. Based on the results of this study it shows that DBH has a significant positive effect on Economic Growth where $t\text{-count is } 2.623 > t\text{-table } 2.20099$, and also DBH has a significant positive effect on Poverty Level where $t\text{-calculate } 3.685 > t\text{-table } 2.20099$.

Keywords: DBH (Profit Sharing Fund), Economic Growth (GRDP), Poverty Level

PENDAHULUAN

Jeffrey A. Frankel (2010) menyebutkan bahwa terdapat sebuah fenomena “kutukan sumber daya alam”, yang mana sebagian besar negara-negara kaya sumberdaya alam justru memiliki performa ekonomi lebih buruk dibandingkan dengan negara dengan sumber daya alam yang lebih sedikit. Idealnya sumber daya alam dapat memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi. Jeffrey D. Sachs dan Andrew M. Warner dalam “Natural Resource Abundance and Economic Growth,” (2007) menyatakan bahwa keberlimpahan sumber daya alam tidak selalu membawa dampak positif dan justru cenderung mengarah pada bencana ekonomi karena mengabaikan pengembangan sumber daya manusia. Gejala semacam ini kemudian dinyatakan sebagai bentuk kutukan sumberdaya alam (*natural resources curse*).

Kondisi tersebut juga terjadi pada beberapa daerah yang kaya sumber daya alam di Indonesia. Teori tentang “kutukan” tersebut telah diketahui dan diupayakan untuk diselesaikan, namun fakta masih menunjukkan fenomena tersebut. Oleh karena itu, perlu untuk mencermati dengan serius persoalan yang terjadi terkait dengan pengelolaan pembangunan daerah.

Target utama yang perlu diwujudkan terkait bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan. Program-program ekonomi daerah tersebut dilaksanakan menggunakan anggaran pendapatan daerah, yang salah satu sumber pendapatan berupa Dana Bagi Hasil (DBH). DBH adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Persoalannya adalah apakah ada korelasi antara DBH dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di suatu daerah?

Persoalan ini mencuat setelah Bupati Kab. Kepulauan Meranti – Muhammad Adil – menjadi perbincangan publik setelah mengungkapkan ketidakpuasannya kepada Kemenkeu (Kementerian Keuangan) terkait DBH (Dana Bagi Hasil) produksi minyak di wilayah tersebut yang terlalu sedikit, yang menyebabkan kabupaten tersebut masuk kategori termiskin se Indonesia. Jumlah penduduk kategori miskin di Kabupaten Meranti mencapai 25,68% pada tahun 2021. Pernyataan ini diungkapkan pada Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada tanggal 8 Desember 2022, yang menyebutkan bahwa DBH tidak sebanding dengan produksi minyak mentah yang telah naik

dua kali lipat menjadi 7.500 barel per hari. Hal lain yang diungkapkan adalah naiknya harga minyak dalam anggaran negara dari USD 60 menjadi USD 100 per barel pada kuartal ke-1 tahun 2022. Di sisi lain, DBH yang diterimanya untuk tahun 2022 sebesar Rp 115 miliar, hanya naik sekitar Rp 700 juta. Persoalan yang diangkat adalah mengapa daerah penghasil minyak justru menjadi kabupaten termiskin di Indonesia serta penghitungan alokasi DBH untuk kabupaten Meranti (Dian & Sabrina, 2022, Dec 13).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan – Lucky Alfirman – menyatakan bahwa pembagian DBH telah diatur dalam Undang-Undang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah), yaitu 85% itu diberikan kepada pusat sedangkan daerah berhak mendapatkan 15%. Staf Khusus Menteri Keuangan – Yustinus Prastowo – menjelaskan bahwa Kemenkeu telah mengalokasikan dana pada tahun 2022 sebesar Rp 872 miliar atau 75% dari APBD Kabupaten Meranti untuk daerah dan dana desa, yang merupakan empat kali lipat dari PAD Meranti pada tahun tersebut sebesar Rp 222 miliar (CNBC Indonesia, 2022).

Berdasarkan peristiwa ketegangan antara Bupati Meranti dengan pihak Kementerian Keuangan ini, perlu penelitian mengenai sejauh mana pengaruh DBH terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan DBH yang digunakan bukan hanya DBH dari sisi Migas, melainkan juga DBH non-Migas atau DBH Pajak, sebab dengan semakin besarnya penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah daerah seharusnya bisa dikonversi menjadi anggaran yang diperuntukkan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dimana dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang ekstrem di Kabupaten Kepulauan Meranti.

KAJIAN LITERATUR

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian DBH dilaksanakan dengan prinsip “by origin” – daerah penghasil menerima bagian yang lebih besar dari pada daerah-daerah lain yang bukan penghasil, serta prinsip “Based on Actual Revenue” – pendistribusian DBH didasarkan pada realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan yang tercantum dalam Pasal 23 UU 33/2004 (Indonesia, 2004). DBH dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber

Daya Alam. DBH Pajak meliputi: DBH-PBB (DBH Pajak Bumi dan Bangunan), DBH-PPh (DBH Pajak Penghasilan), DBH-CHT (DBH Cukai Hasil Tembakau). Adapun DBH Sumber Daya Alam meliputi: DBH Kehutanan, DBH Mineral dan Batu Bara, DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH Perikanan (Kemenkeu, 2017).

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2000) yang mengutip pernyataan Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang dalam kapasitas suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting untuk menilai kesuksesan pembangunan sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki peran penting dalam mempersiapkan ekonomi untuk tahap kemajuan berikutnya, menciptakan peluang kerja, meningkatkan produktivitas, serta menjaga distribusi pendapatan yang merata.

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan beberapa indikator, seperti: (1) indikator PDB (Produk Domestik Bruto) untuk nasional dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk wilayah atau daerah, (2) indikator pendapatan riil per kapita, (3) indikator kesejahteraan penduduk, (4) dan indikator penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Indikator yang banyak digunakan oleh BPS, para peneliti dan juga ekonom, serta lembaga-lembaga negara dan World Bank adalah tolak ukur dari nilai PDB untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan PDRB untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah regional. PDRB merepresentasikan pendapatan daerah riil yang dihitung dari keseluruhan output dari barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah. Fungsi krusial dari PDRB adalah sebagai indikator performa ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah (Samuelson & Nordhaus, 2004).

Penyusunan PDRB melibatkan dua pendekatan, yaitu pendekatan produksi (lapangan usaha) dan pendekatan pengeluaran. Kedua pendekatan ini menggambarkan komposisi nilai tambah dalam rinciannya berdasarkan sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) serta komponen penggunaannya. PDRB dengan pendekatan lapangan usaha menggunakan akumulasi dari semua nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha dari berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dengan pendekatan pengeluaran menggunakan perspektif bagaimana nilai tambah tersebut digunakan.

Terdapat dua versi penilaian PDRB, yaitu berdasarkan "harga berlaku" dan "harga konstan". Harga berlaku merujuk pada penilaian seluruh agregat menggunakan harga tahun berjalan,

sementara harga konstan berdasarkan harga satu tahun dasar tertentu. BPS (Badan Pusat Statistik) saat ini menggunakan acuan internasional yaitu harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian, sedangkan PDRB diukur dalam satuan rupiah berdasarkan harga konstan. Ukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan persentase. Jika persentase pertumbuhan ekonomi yang diperoleh positif dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka perekonomian daerah dinilai telah tumbuh dan berkembang (BPS, 2023).

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merujuk pada situasi di mana individu atau sekelompok orang menghadapi keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasar mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan merupakan kondisi di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan bisa timbul akibat kelangkaan sarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan peluang kerja (Bappenas, 2022).

Penduduk Miskin

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur tingkat kemiskinan. Pendekatan ini merujuk pada buku "Handbook on Poverty and Inequality" karya Jonathan Haughton dan Shahidur R. Khandker (2009) yang diterbitkan oleh World Bank. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi seseorang untuk mencukupi kebutuhan dasar, baik dalam hal pangan maupun non-pangan, yang diukur melalui pengeluaran. Seseorang dianggap berada dalam kategori penduduk miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan beberapa indikator. Indikator pertama adalah HCI-P0 (Head Count Index) adalah persentase penduduk yang berada di bawah GK Garis Kemiskinan. Indikator kedua adalah HCI-P1, yaitu indikator untuk mengukur kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index). Metodenya adalah mengukur rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indikator ketiga adalah HCI-P2, yaitu indikator untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan (*Squared Poverty Gap Index*). Indikator ini

digunakan untuk mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin, dengan memberi bobot lebih besar pada yang paling miskin (BPS, 2023).

GK (Garis Kemiskinan)

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan jumlah uang minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dalam satu bulan, termasuk baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM (Garis Kemiskinan Makanan) merujuk pada angka pengeluaran minimal yang diperlukan untuk kebutuhan makanan yang setara dengan konsumsi 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket kebutuhan makanan dasar melibatkan 52 jenis komoditas, seperti bahan makanan pokok, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak, dan lain-lain. GKNM (Garis Kemiskinan Non-Makanan) merujuk pada angka pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Paket kebutuhan non-makanan melibatkan 51 jenis komoditas di wilayah perkotaan dan 47 jenis komoditas di wilayah perdesaan (Nefertiti, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis, mengukur variabel yang sedang diteliti dan akan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Pengujian hipotesis biasanya dilakukan untuk menjelaskan karakteristik dan hubungan yang pasti atau membuktikan perbedaan antara dua kelompok yang saling bebas.

Objek penelitian adalah data dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri baru berdiri Desember 2008. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa DBH, PDRB, dan TK mulai tahun 2010-2022 dalam bentuk *time series*. Penelitian ini menggunakan data deret berkala 13 tahun yang dimulai dari tahun 2010-2022. Data yang diambil merupakan data akumulasi tahunan atau agregat satu tahun sehingga terdapat 13 data per masing-masing variabel. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari dokumen atau katalog PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Kepulauan Meranti, dokumen Statistik Keuangan Pemda Riau BPS

Provinsi Riau, dan Dokumen TKDD (Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) DJPK Kemenkeu (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan). Data tersebut diambil melalui portal data TKDD website www.djpk.kemenkeu.go.id dan juga data publikasi website www.merantikab.bps.go.id.

Data PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran tahun 2010-2022 atas dasar harga konstan tahun 2010 terhadap Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk Tingkat Kemiskinan, data yang diambil bersumber dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Kepulauan Meranti yang dianalisis menggunakan data persentase tingkat kemiskinan (P0) yang diambil berdasarkan time series tahun 2010-2022. Data DBH (Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam) merupakan data sekunder yang diambil dari ringkasan realisasi APBN kabupaten/kota se-Indonesia berupa TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) oleh DJPK Kemenkeu (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan) dengan time series tahun 2010-2022. Satuan variabel Dana Bagi Hasil ini adalah dalam miliar Rupiah.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dataset statistik atau studi pustaka dan dokumen yang dilakukan dengan menghimpun data-data relevan yang sudah tersedia melalui buku, jurnal, skripsi, berita, artikel ilmiah, laporan statistik dan sumber kredibel lainnya sesuai dengan topik penelitian.

Variabel Penelitian

Adapun yang menjadi variabel dependen (variabel Y) dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) sebagai variabel (Y1) dan juga Tingkat Kemiskinan sebagai variabel (Y2). variabel independen (variabel X) adalah DBH (Dana Bagi Hasil Pajak & Sumber Daya Alam).

Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode pengujian regresi linier sederhana dengan menguji koefisien korelasi (r), koefisien determinasi (r^2), uji signifikansi (uji-t) dan hipotesis. Pada penelitian ini pengujian regresi linier sederhana dilakukan menggunakan bantuan aplikasi pengolah angka Microsoft Excel dan juga aplikasi pengolah data SPSS v20.

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengeksplorasi arah dari relasi antara variabel bebas dan variabel terikat, apakah hubungannya bersifat positif atau negatif. Selain itu, analisis ini juga berguna untuk melakukan estimasi nilai variabel terikat saat variabel bebas mengalami perubahan. Analisis regresi sederhana biasanya memanfaatkan data dengan skala interval atau rasio. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel predictor X dan response Y. Hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi (r). Koefisien determinasi (r^2) menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Jika telah ditentukan Koefisien Determinasi (r^2), maka selanjutnya dilakukan uji signifikan hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Pengujian hipotesis menggunakan asumsi/ pernyataan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis lain (H_1 ; H_2 ; H_3 ; ..., H_N). Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan oleh H_0 dan penolakan H_0 dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H_1 , H_2 , dan seterusnya. Pengujian signifikansi hipotesis dapat menggunakan uji-t, yakni dengan membandingkan nilai t_{hitung} (t_{hit}) dengan t_{tabel} (t_{tab}). Jika $t_{hit} > t_{tab}$ atau $-(t_{hit}) > -(t_{tab})$, berarti H_1 , H_2 , dan seterusnya diterima. H_0 akan diterima jika $-(t_{hit}) < t_{tab} < t_{hit}$, berarti H_1 , H_2 , dan seterusnya ditolak. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi, α yang sering digunakan dalam berbagai penelitian, yaitu signifikansi $\alpha = 5\%$ ($\alpha = 0,05$). Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil < dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y), dan jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar > dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) (Yuliara, 2016).

Model Analisis

Adapun dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan dua persamaan regresi. Karena hendak mencari dua hasil penelitian regresi sederhana, yakni: Pengaruh DBH (Dana Bagi Hasil Pajak & Sumber Daya Alam) terhadap Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (Produk Domestik Regional Bruto dan juga Pengaruh DBH (Dana Bagi Hasil Pajak & Sumber Daya Alam) terhadap TK (Tingkat Kemiskinan). Rumus persamaan regresinya ditunjukkan pada rumus 1 dan 2.

$$PDRB = a + b \text{ DBH} \quad (1)$$

$$TK = a - b \text{ DBH} \quad (2)$$

Persamaan 1 disusun berdasarkan kondisi yang diharapkan berupa korelasi positif, yaitu semakin tinggi DBH yang diterima oleh kabupaten/kota maka diharapkan pertumbuhan ekonomi juga semakin tinggi, sebaliknya jika DBH rendah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan rendah. Persamaan 2 disusun berdasarkan kondisi yang diharapkan berupa korelasi negatif, yaitu semakin tinggi DBH yang diterima oleh kabupaten/kota maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah, sebaliknya jika semakin rendah DBH maka semakin tinggi tingkat kemiskinan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa anggaran benar-benar diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Hipotesis Penelitian dapat ditentukan sebagai berikut:

Persamaan 1 ($Y_1 = a + b X$):

$H_0: \beta = 0$; variabel X (DBH Pajak & Sumber Daya Alam) tidak berpengaruh signifikan/nyata terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi/PDRB).

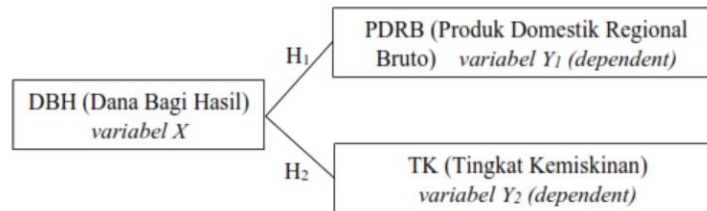
$H_1: \beta \neq 0$; variabel X (DBH Pajak & Sumber Daya Alam) berpengaruh signifikan/nyata terhadap variabel Y1 (Pertumbuhan Ekonomi/PDRB).

Persamaan 2 ($Y_2 = a - b X$)

$H_0: \beta = 0$; variabel X (DBH Pajak & Sumber Daya Alam) tidak berpengaruh signifikan/nyata terhadap variabel Y (Tingkat Kemiskinan).

$H_2: \beta \neq 0$; variabel X (DBH Pajak & Sumber Daya Alam) berpengaruh signifikan/nyata terhadap variabel Y2 (Tingkat Kemiskinan).

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggunakan satu variabel independen dan dua variabel dependen ditunjukkan dalam gambar 1. Dengan asumsi dasar bahwa hipotesis pertama (H_1) DBH (Dana Bagi Hasil Pajak&SDA) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti dan hipotesis kedua (H_2) DBH (Dana Bagi Hasil Pajak&SDA) berpengaruh terhadap TK (Tingkat Kemiskinan) di Kabupaten Kepulauan Meranti.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian terkait dengan hubungan antara DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak & Sumber Daya Alam, tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB), tingkat kemiskinan. Objek penelitian adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang memiliki tingkat kemiskinan terparah di Propinsi Riau. Tingkat kemiskinannya mencapai 25,68 persen pada tahun 2021 dan telah turun menjadi 23,84 persen pada tahun 2022, hanya saja tetap berada dalam presentase terbesar kemiskinan di Provinsi Riau. Hal ini berarti, dari 209.460 jumlah penduduk Kepulauan Meranti terdapat 49,93 ribu penduduk miskin atau jika dibuat perbandingan maka 1 dari 4 orang warga Meranti terkategori miskin.

Penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa DBH dalam satuan miliar rupiah, dan variabel terikat berupa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan TK (tingkat kemiskinan) yang keduanya dalam satuan persen. Angka tingkat kemiskinan menggunakan standar P_0 dan tidak menggunakan P_1 dan P_2 . Tingkat kemiskinan (Head count Ratio) jenis P_0 ini digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Data yang digunakan sebagai bahan analisis ditunjukkan dengan tabel 1.

Tabel 1. Data DBH, PDRB, dan TK Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2010-2022

No.	Tahun	DBH (miliar rupiah)	PDRB (%)	TK (%)
1	2010	375.78	7.45	42.57
2	2011	546.88	6.88	34.53
3	2012	630.8	6.7	35.88
4	2013	470.44	4.24	35.74
5	2014	618.68	4.45	33.85
6	2015	306.64	2.85	34.08

7	2016	396.72	3.2	30.89
8	2017	209.5	3.29	28.99
9	2018	219.42	4.03	27.79
10	2019	285.77	2.64	26.93
11	2020	201.21	0.43	25.28
12	2021	187.86	2.56	25.68
13	2022	249.98	3.17	23.84

Sumber: merantikab.bps.go.id, diakses 2022, data diolah

Hasil dari analisis penelitian ini menghasilkan penjabaran persamaan 1 dan persamaan 2 sebagai berikut:

1. Pengaruh DBH terhadap PDRB

Persamaan 1 ($\text{Log_PDRB} = a + b \text{Log_DBH}$) digunakan untuk melihat pengaruh DBH Pajak dan Sumber Daya Alam terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa H_1 diterima, yaitu variabel X atau DBH Pajak & Sumber Daya Alam berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Y_1 (Pertumbuhan Ekonomi/PDRB). Hal ini diketahui dari hasil t_{hitung} sebesar 2,623 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,20099. Karena nilai $t_{hit} > t_{tab}$, maka H_0 ditolak, H_1 diterima.

Model persamaan regresi linier sederhana yang dihasilkan ditunjukkan dengan rumus 3.

$$\text{Log_Y} = -2,043 + 1,020 \text{Log_X} \quad (3)$$

Berdasarkan rumus 3, bisa diketahui bahwa setiap penerimaan 1% DBH Pajak & Sumber Daya Alam, akan menaikkan Pertumbuhan Ekonomi/PDRB sebesar 1,020 %. Jika sama sekali tidak menerima DBH Pajak & Sumber Daya Alam per-tahun, maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah sebesar -2,043%.

Koefisien korelasi (r) adalah 0,620. Nilai ini memberi arti bahwa, hubungan variabel Log_DBH (X) dengan variabel Log_PDRB (Y) adalah kuat, persentasenya adalah 62%. Jadi, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat dipengaruhi oleh DBH Pajak & Sumber Daya Alam. Koefisien Determinasi (r^2) = 0,385. Nilai ini berarti bahwa, 38,5% variabel Log_DBH (X) dapat menerangkan atau menjelaskan variabel Log_PDRB (Y), dan 61,5% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Berdasarkan hasil di atas, maka penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendriwiyanto & Nurkholis (2014) di Jawa Timur tahun 2010-2012, dimana DBH (Dana Bagi

Hasil) berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi/PDRB. Juga sejalan dengan penelitian Rahmah & Zein (2016), dimana DBH berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi/PDRB di Provinsi Aceh tahun 2011-2014. Artinya, semakin tinggi dana bagi hasil yang direalisasikan maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah dana bagi hasil yang direalisasikan maka akan semakin rendah juga pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini pun juga sesuai dengan penelitian Muhammad Bugis (2012) di Provinsi Maluku periode tahun 2002-2009, dimana DBH berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi/PDRB. Begitupun dengan penelitian Amin Pujiati (2008) di Karesidenan Semarang tahun 2002-2006, menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi/PDRB. Sedangkan berdasarkan penelitian Mohamad Azis (2016) di Kabupaten Malinau tahun 2004-2013, DBH berpengaruh namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi/PDRB. Adapun penelitian Santosa (2013) di 33 Provinsi di Indonesia tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.

2. Pengaruh DBH terhadap TK

Persamaan 2 ($\text{Log_TK} = a - b \text{Log_DBH}$) digunakan untuk melihat pengaruh DBH Pajak & Sumber Daya Alam terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa H_2 diterima atau variabel DBH Pajak & Sumber Daya Alam (X) berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2). Hal ini diketahui dari nilai t_{hitung} sebesar 3,685 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,20099. Karena nilai $t_{hit} > t_{tab}$, maka H_0 ditolak, H_1 diterima

Model persamaan regresi linier sederhana ditunjukkan dengan rumus 4.

$$\text{Log_Y} = 0,755 + 0,291 \text{Log_X} \quad (4)$$

Maknanya adalah setiap kenaikan 1% DBH Pajak & Sumber Daya Alam, maka TK (Tingkat Kemiskinan) juga ikut naik sebesar 0,291%, dan jika sama sekali tidak menerima DBH Pajak & Sumber Daya Alam per-tahun, TK (Tingkat Kemiskinan) adalah sebesar 0,755%.

Koefisien Korelasi (r) = 0,743. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan variabel Log_DBH (X) dengan variabel Log_TK (Y_2) adalah kuat, persentasenya mencapai 74,3%. Jadi, TK (Tingkat Kemiskinan) sangat dipengaruhi oleh DBH (Dana Bagi Hasil Pajak & Sumber Daya Alam). Koefisien Determinasi (r^2) = 0,552. Hal ini menunjukkan berarti bahwa 55,2% variabel

Log_DBH (X) dapat menerangkan atau menjelaskan variabel Log_TK (Y_2) dan 44,8% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Berdasarkan penelitian di atas, maka hasil penelitian tersebut berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian Agum dan Najwa (2021) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah tahun 2015-2019. Anggaran DBH yang diterima pemerintah daerah semakin tinggi, maka Tingkat Kemiskinan akan turun secara signifikan. Hasil penelitian juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Hakim (2014), bahwa DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2006-2011. Penelitian tersebut juga berbeda dengan dua penelitian dengan objek yang sama, yaitu terkait dengan tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2011-2015 dengan perbedaan variabel, yaitu: (1) Putrayuda, dkk (2017) dan (2) Isramiwarti, dkk (2017). Keduanya menjelaskan bahwa DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Semakin besar penerimaan DBH, maka pengeluaran untuk program pengentasan kemiskinan naik, sehingga terjadi penurunan tingkat kemiskinan.

Melalui hasil analisis penelitian ini justru dapat dipahami bahwa sekalipun DBH berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi, namun tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Berdasarkan hal ini justru dapat diasumsikan bahwa program kerja Kabupaten Kepulauan Meranti perlu ditinjau ulang karena tidak terkait dengan pengurangan tingkat kemiskinan. Hal ini tampak dari pola pengeluaran anggaran sebagaimana tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Belanja Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021

Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	861.943.955.106,00	747.621.769.945,70	86,74
Belanja Modal	189.571.068.885,00	105.168.333.984,19	55,48
Belanja Tidak Terduga	18.447.334.018,00	10.987.192.304,00	59,56
Belanja Transfer	162.147.913.125,00	144.044.509.849,00	88,84
Jumlah	1.232.110.271.134,00	1.007.821.806.082,89	81,8

Sumber: merantikab.bps.go.id, diakses 2022

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung

dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja asset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang. Belanja tidak terduga digunakan antara lain untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja transfer merupakan Belanja Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas anggaran masih digunakan untuk operasi, sehingga tentu tidak akan menyentuh aspek penting dalam upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh, khususnya jika dikaitkan dengan potensi daerah.

Sumber daya alam Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas: pertambangan (minyak bumi dan timah) dan agrikultur (perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan). Terkait dengan potensi ini, justru tidak diperhatikan serius pada bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebab dari tiga kampus swasta di kabupaten ini, dengan program studi: (1) manajemen informatika, (2) teknik informatika, (3) pendidikan jasmani-kesehatan-rekreasi, (4) pendidikan matematika, dan (5) pendidikan agama Islam. Hal ini tentu tidak menyentuh aspek penting jika dikaitkan dengan sumber daya alam serta penyiapan ekonomi masyarakat. Program studi yang diperlukan harusnya dikaitkan dengan pertambangan ataupun sektor agrikultur.

Tingkat kemiskinan jika dikaitkan dengan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Kepulauan Meranti adalah sebesar 65,60 persen pada tahun 2021. Ini menggambarkan bahwa 65,60 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja dan sisanya 34,40 persen bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya), dengan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebesar 4,43 persen. Hanya saja angkatan kerja ini sebagian besar mengelola sektor pertanian tradisional. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020, sekitar 42,34 persen tenaga kerja terserap di lapangan usaha pertanian, sedangkan 34,38 persen tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Meranti bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Sektor pertambangan (minyak bumi) dikelola oleh PT. EMP Malacca Strait, bukan dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), tentu saja perannya dalam menopang pembangunan daerah sangat terbatas.

Jika anggaran dikelola dengan baik, seharusnya semakin meningkatnya DBH, tingkat kemiskinan turun. Peningkatan DBH dari tahun ke tahun, jika diikuti dengan pengalokasian

yang tepat sasaran, maka dapat menambah anggaran untuk peningkatan infrastruktur, kesejahteraan rakyat, pembiayaan fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit, dan lain-lain yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (P_0), sekalipun data pada tabel 1 menunjukkan telah terdapat penurunan tingkat kemiskinan, dari 42,57 % pada tahun 2010, kemudian turun signifikan menjadi 34,53% pada tahun 2011. Tingkat kemiskinan fluktuatif selama lima tahun, dan baru menunjukkan trend turun sejak tahun 2016-2021, yaitu 30,89% menuju 25,68%, kemudian menjadi 23,84% pada tahun 2022.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. DBH (Dana Bagi Hasil Pajak & Sumber Daya Alam) berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi/PDRB di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2010-2022.
2. DBH (Dana Bagi Hasil Pajak & Sumber Daya Alam) justru berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2010-2022 yang mana seharusnya berpengaruh negatif. Hal ini dimungkinkan merupakan kasus khusus di objek penelitian disebabkan tidak optimalnya pengelolaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Mohammad. (2016). Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen Universitas Mulawarman*, 12(1), 49-63.
- Bappenas (2022). SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu). https://sepakat-demo.bappenas.go.id/wiki/Main_Page
- BPS. (2023). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/8b8dac76525a92a21dc6568a/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-indonesia-tahun-2023.html>
- BPS, 2023. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2018-2022. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/06/14/99ca8a81cd97e69dc04a31bc/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2018-2022.html>
- Bugis, M. (2012). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Periode Tahun 2002-2009. *Jurnal Maneksi (Manajemen Ekonomi & Akuntansi)*. Vol. 1(1).
- CNBC Indonesia. (2022, 13 Dec). Kronologi Marahnya Bupati Meranti, Sebut Kemenkeu Setan. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221213092956-4-396355/kronologimarahnya-bupati-meranti-sebut-kemenkeu-setan>
- Dian, E.N., Sabrina A. (2022, Dec 13). Kronologi Bupati Meranti Marahi Dirjen Kemenkeu hingga Ditegur Keras Mendagri. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/13/06383801/kronologi-bupatimeranti-marahi-dirjen-kemenkeu-hingga-ditegur-keras>
- Frankel, J. A. (2010). The natural resource curse: A survey (Working Paper No. 15836). https://www.nber.org/system/files/working_papers/w15836/w15836.pdf
- Gumelar, Agum., & Khairina, Najwa. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan, Studi Kasus Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019. *Jurnal EkonomiQu FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 11(2), 342-364.
- Haughton, Jonathan., dan R. Khandker, Shahidur. (2009). *Handbook On Poverty and Inequality*. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington DC.

- Hendriwiyanto, G., Nurkholis (2014). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. <https://paperity.org/p/340418761/pengaruh-pendapatan-daerah-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-dengan-belanja-modal-sebagai>
- Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Ismail, Arie & Hakim, Abdul (2014). Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Jurnal Aplikasi Bisnis, 16(9), 2173-2175.
- Isramiwarti, Riry., Rasuli, M., & Taufik, Taufeni. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2015. Pekbis Jurnal FEB Universitas Riau, 9(3), 195-213.
- Jeffrey D. Sachs & Andrew M. Warner (1995). Natural Resource Abundance and Economic Growth (Working Paper No. 5398). https://www.nber.org/system/files/working_papers/w5398/w5398.pdf
- Kemenkeu RI. (2017). Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prinsip, dan Jenis. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726>
- Nefertiti, S.H., (2023). Pengenalan Indikator Kemiskinan Dan Ketimpangan. BPS Prov Jawa Barat. <https://bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2023/10/05.-Pengenalan-Indikator-Kemiskinan-dan-Ketimpangan-BPS.pdf>
- Paul, A. Samuelson., & Nordhaus, William. (2004). Ilmu Makroekonomi. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Pujiati, A. (2009). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. Economic Journal of Emerging Markets, 13(2), 61-70. DOI: 10.20885/vol13iss2aa221
- Putrayuda, T. F., Efni, Yulia & Kamaliah (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya pada Tingkat Kemiskinan di

- Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 9(3), 201.
- Rahmah, A.R., Zein, Basri. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1(1): 213-220.
- Santosa, Budi. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan di 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan*, 2(5), 130-143.
- Todaro, Michael. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Yuliara, I Made. (2016). *Modul Regresi Linier Sederhana*. Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/3218126438990fa0771ddb555f70be42.pdf